

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ahmad Ali, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.
- Baharuddin Lopa, 1997. *Masalah Korupsi dan Pemecahannya*, Kipas Putih Aksara, Jakarta.
- Bambang Purnomo, 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Bina Aksara, Yogyakarta.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2007, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Darmoko, Ekotjipto, Nanang Hape, *et.al.*, 2010, *Pedoman Pewayangan Berperspektif Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta.
- Darwan Prins, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Edi Setiadi, 2004, *Pemberdayaan Peran dan Kompleksitas Interaksi Advokat dalam Proses Penegakan Hukum untuk Mewujudkan Keadilan*, Disertasi, Program Doktor UNDIP, Semarang.
- Edward O.S Hiariej, , 2012, *Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*, Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Evi Hartanti, 2005 *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafia, Jakarta.
- Firman Wijaya, 2012, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Penaku, Jakarta.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, cetakan pertama, Yogyakarta.
- Hibnu Nugroho, 2012, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jakarta, Media Prima Aksara.
- H.B. Sutopo, 1995, *Pengantar Penelitian Kualitatif Dasar – Dasar Teori dan Praktis*, Pusat Penelitian UNS, Surakarta

- IGM. Nurdjana, 2005. *Korupsi Dalam Praktik Bisnis. Pemberdayaan Penegakan Hukum, Progam Aksi Dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ikhwan Fahrojih dkk, 2005, *Mengerti dan Melawan Korupsi*, Yapika dan Malang Corruption Watch, Jakarta.
- Kadri Husin & Budi Riski Husin, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kuat Puji Prayitno, 2008. *Sistem Peradilan (Criminal justice system)*, Materi kuliah Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2002, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi kasus penerapan dan perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, *Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, KPK, Jakarta
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Perlindungan Hukum terhadap whistleblower dan justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime*, PT. Alumni, Bandung
- Loeby Loqman, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Datacom, Jakarta.
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Martiman Projomahidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbaik dalam Delik Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999)*, Mandar Maju, Bandung.
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- an Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Rusli Muhammad, “Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No.2 Vol.22 (April 2015:203-222).
- Sanapiah Faesal, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*, Yayasan Asah Asih Asuh (Y A3), Malang.
- Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator), : Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta : Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011.

- Satijipto Raharjo, 2000, *‘Ilmu Hukum’*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 1998, *Sistem Peradilan Pidana dalam Wacana Kontrol Sosial*. Jurnal Pidana dan Kriminologi, UNDIP, Semarang.
- Sharistha Nathalia Tuage, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”, *Lex Crimen*, Volume. II/No. 02, (April-Juni 2013).
- Syahrial Martanto Wirawan dan Melly Setyowati, 2007, *Pemberian Bantuan Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Sebuah Observasi Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- , 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignyoosebrototo, 2006, *Keanekaragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, Makalah Lokakarya, Yayasan Dewi Sartika, Semarang.
- Sugiono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Siswanto Sunarso, 2015, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Suradi, 2006. *Korupsi dalam sector pemerintahan dan swasta*. Gava Media, Yogyakarta.
- Suratman dan Philip Dillah, 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan :

- , Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- , Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- , Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011, tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di Dalam Perkara Pidana Tertentu.
- , Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Tahun 2011.

Karya Ilmiah :

- Agus Saptoaji, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Publikasi Ilmiah.*
- Angkasa, 1993, *Prisonisasi Dan Permasalahannya Terhadap Pembinaan Narapidana (Suatu Studi di Lembaga Pemasyarakatan Semarang dan Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto)*, Semarang, Tesis S-2 Ilmu Hukum UNDIP.
- Maria Alfons, 2010, “*Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*”, Ringkasan Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, Malang.
- Nixson, Syafruddin Kalo, et.al., “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*”, *USU Law Journal*, Vol.II-No.2 (November 2013).
- Rika Ekayanti, “*Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Terkait Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*”, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4, No.1: 138-149, (Mei 2015).
- Supriyadi Widodo Eddyono, Syahrial Martanto wiryawan, et.al., 2008, *Pokok-pokok Pikiran penyusunan Cetak Biru Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta.

Sumber Lain :

- Abdul Haris Semendawai, “*Pokok-Pokok Pikiran mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia*”, makalah disampaikan pada *International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011, hlm. 4.
- Nyoman Sarikat Putra Jaya, 2006. *Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi dalam Rangka Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Makalah Seminar 27 April 2006, Semarang.
- Jon Effreddi, 2005. *Fungsi Positif Melawan Hukum Materiel dalam Tindak Pidana Korupsi*. Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun ke-XX No. 240, September 2005, Jakarta.

Jurnal :

Ahmad Sofyan, <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>, diakses tanggal 24 Juli 2020.

Ayu Diah Pradnya Swari P.J dan Ni Nengah Adiyaryani, Ojs.unud.ac.id. *Pengaturan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana.*

Dwi Oktafia A. dan Nita Ariyani, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 2 VOL. 27 MEI 2020 : 328 -344, *Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, diakses tanggal 13 Februari 2021.

River Yohanes Manalu, *Lex Crimen* Vol.IV/No1/Jan – Mar/2015, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada tanggal 22 November 2016.

Internet :

<http://rahmanamin1984.blogspot.com/2014/03/kebijakan-hukum-pidana-terhadap-justice.html>, diakses pada tanggal 22 November 2016.

<http://duniahukumonline.blogspot.co.id/2013/06/justice-collaborator.html>, diakses pada tanggal 19 April 2017.

<http://eviana19.blogspot.com>, *Perilaku Menyimpang*, diakses pada tanggal 10 Mei 2018.

<http://repository.unpas.ac.id/36983/6/BABII.pdf>, diakses pada tanggal 29 Juli 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/>, diakses tanggal 20 Juli 2020.

<https://media.neliti.com/media/publications/3230-ID-justice-collaborator-dalam-tindak-pidana-korupsi.pdf>, diakses pada tanggal 23 Desember 2020

<https://media.neliti.com/media/publications/44184-ID-perlindungan-hukum-terhadap-justice-collaborator-terkait-penanganan-tindak-pidana>, diakses pada tanggal 27 Desember 2020

<https://www.kompasiana.com/sitim4ryam/550e2729a33311b72dba7f02/pidana-tutupan>, diakses tanggal 28 Januari 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan/>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021.